
IMPLEMENTASI AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP (STUDI KASUS PADA UMKM BATIK DI KOTA SEMARANG)

Ira Septriana^{1*} dan Eva Vitriyani²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang 50131, Indonesia

*Corresponding Author: iraseptriana@gmail.com

Diterima: Februari 2016 ; Direvisi: Juni 2016; Dipublikasikan: Septembert 2016

ABSTRACT

This study was to determine how the application and understanding of the accounting method for MSMEs Batik Semarang and whether in accordance with the standards set by the government. Because of FAS EWPA set with the purpose of facilitating entities without public accountability like MSMEs in presenting the financial statements to be more relevant and informative in order to monitor the performance of business units within a single accounting period. There are 30 units of MSMEs Batik Semarang as research sample selected by convenience sampling method using qualitative descriptive analysis method. The results indicate that the perception and understanding of MSME entrepreneurs Batik Semarang on Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (FSA EWPA) was still very simple, due to the lack of entrepreneurs knowledge regarding the technical preparation of financial statements based FSA EWPA. MSMEs feel that income statement is enough, and there is a lacking socialization by the related department like Department of Cooperatives and MSMEs Semarang in applying the Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability.

Keywords: MSMEs; FAS EWPA; Financial Statements

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pemahaman metode pencatatan akuntansi bagi para pelaku UMKM Batik di Kota Semarang dan apakah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena SAK ETAP ditetapkan dengan tujuan memudahkan entitas tanpa akuntabilitas publik seperti UMKM dalam menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan dan informatif guna memantau kinerja unit usaha dalam satu periode akuntansi. Sebanyak 30 Unit UMKM Batik Semarang menjadi sample penelitian yang dipilih dengan metode convenience sampling dengan metode Analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman para pengusaha UMKM Batik di Kota Semarang mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ternyata masih sangat sederhana, dikarenakan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai teknis penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. UMKM merasa bahwa laporan keuangan yang menunjukkan laba rugi perusahaan saja sudah cukup, serta kurangnya sosialisasi dari dinas terkait setempat seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Kata kunci : UMKM; SAK ETAP; Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan dalam segala bidang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut juga terjadi pada bidang ekonomi dan industri. Peningkatan perkembangan dalam dunia ekonomi dan industri tersebut tidak lepas dari peranan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Baik perusahaan besar maupun perusahaan dalam skala mikro kecil dan menengah yang disebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Mitchell dan Reid (2000) UMKM merupakan kekuatan penting dalam ekonomi berbasis informasi modern. Hal tersebut dikatakan demikian karena UMKM adalah jenis usaha yang lebih fleksibel dan memiliki kreativitas yang inovatif sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan usaha besar (Strouhal et al, 2009).

Undang-Undang No.20 tahun 2008 mengatur semua hal tentang UMKM, dan dengan berlakunya undang – undang tersebut maka usaha mikro kecil menengah mendapatkan jaminan serta keadilan usaha yang dapat meningkatkan potensi dan kedudukan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, terciptanya lapangan kerja serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1997-1998 atau krisis ekonomi global tahun 2008, banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan dan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran pada banyak karyawannya. Namun hal ini tidak berdampak banyak pada UMKM dikarenakan UMKM umumnya menggunakan mata uang rupiah dan relatif jarang menggunakan hutang perbankan, serta tidak atau belum berhubungan dengan pihak asing, UMKM juga dapat menjangkau sumber daya manusia yang menjadi pengangguran karena PHK untuk dapat bekerja kembali.

UMKM juga memberikan kontribusi bagi Indonesia dalam segi ekonomi makro. Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang dihasilkan dari kegiatan UMKM mencapai 57,12%. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2013, jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 55,2 juta unit. Jumlah UMKM yang besar tersebut mencerminkan besarnya potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan lagi bagi UMKM untuk lebih berkontribusi aktif bagi Indonesia.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UU No. 9 Tahun 1995 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan \leq Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada tanggal 17 Juli 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2011. SAK-ETAP ini lebih mudah dipahami dibanding Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum karena entitas tanpa akuntabilitas publik didominasi oleh UMKM dimana sebagian besar pengusahanya dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Melihat pentingnya penggunaan SAK-ETAP sebagai standar pembuatan laporan keuangan pada UMKM, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai SAK ETAP. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM Batik di kota Semarang, baik unit usaha yang bersifat independen maupun unit usaha dibawah binaan suatu lembaga tertentu.

Pada tanggal 24 Juli 2007, Pemerintah Kota Semarang melalui Disperindag *melaunching* batik Semarangan melalui seminar pada paguyuban Perajin Kampung Batik yang membahas mengenai identitas dan motif yang akan digunakan sebagai ciri khas, kemudian disepakati bahwa Batik Semarangan adalah batik yang diproduksi oleh warga kota Semarang dengan motif atau ragam hias yang berhubungan dengan *landmark* kota Semarang seperti Tugumuda dan Lawang Sewu. Sejalan dengan perkembangan jaman, nilai estetis

ekonomis melangkah maju beriringan, banyak masyarakat yang berminat pada batik karena memiliki fungsi rekreatif dan edukatif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya dilakukan oleh Salmiah (2015) tentang penerapan SAK-ETAP menyatakan bahwa 83% UMKM belum memahami isi SAK-ETAP dan 70% tidak menggunakan software atau dikerjakan secara manual. Hal ini menyimpulkan bahwa penerapan SAK-ETAP pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop dan UMKM Pekanbaru masih sangat sederhana atau tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Hal serupa diungkapkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Alfitri (2014) pada Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Klaten bahwa pemahaman perajin mebel tentang SAK-ETAP masih sangat rendah serta pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing perajin mebel, pencatatan yang dilakukan perajin mebel tersebut tidak sesuai dengan siklus akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kalangi (2014) pada PT. Nichindo Manado Suisan bahwa perusahaan belum menyusun laporan keuangan lengkap menurut SAK-ETAP. Hal ini berdasarkan syarat kelengkapan SAK-ETAP yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan keuangan serta terdapat beberapa pos pada neraca yang tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Salmiah (2015) tentang Analisa Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Salmiah (2015) dilakukan pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru dan penelitian ini dilakukan pada UMKM Batik Kota Semarang. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada variabel dan metode analisis yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana para pelaku UMKM menerapkan sistem pencatatan keuangannya dan kesesuaiannya terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sehingga mereka lebih mengetahui kondisi keuangan dan kinerja usahanya yang sebenarnya.

Penelitian ini dibatasi pada 8 dari 30 Bab dalam SAK-ETAP yaitu meliputi Ruang Lingkup, Konsep dan Prinsip Pervasif, Penyajian Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Saldo Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pembatasan pada penelitian ini dikarenakan penelitian ini hanya untuk melihat bagaimana penerapan dan seberapa mengerti para pelaku usaha tentang metode penerapan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP. Melihat pentingnya penggunaan SAK-ETAP sebagai standar pembuatan laporan keuangan pada UMKM, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai SAK-ETAP dengan mengambil objek penelitian pada UMKM Batik di kota Semarang, baik unit usaha yang bersifat independen maupun unit usaha dibawah binaan suatu lembaga tertentu.

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penerapan akuntansi pada UMKM Batik di Kota Semarang?
2. Apakah penerapan akuntansi pada UMKM Batik di Kota Semarang telah sesuai dengan SAK-ETAP?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi standar Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil merupakan ekonomi usaha produktif yang berdiri secara independen, yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha dan bukan termasuk anak perusahaan dan bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah merupakan ekonomi usaha produktif yang berdiri secara independen, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan termasuk dalam anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah harta bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut M.Tohar (1992) definisi usaha kecil dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Total Aset
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka usaha.
2. Berdasarkan Total Penjualan Bersih per Tahun
Berdasarkan hal ini pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Berdasarkan Status Kepemilikan
Dalam hal ini, didefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah usaha berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum maupun tidak, didalamnya termasuk koperasi.

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah berdasarkan UU No.1 Tahun 1995 memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI).
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai perusahaan besar.
5. Bentuk usaha orang perorang, badan usaha berbadan hukum tidak termasuk koperasi.
6. Untuk sektor industri, memiliki total aset maksimal Rp.5.000.000.000,-
7. Untuk sektor non industri, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.600.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.3.000.000.000,- pada usaha yang dibiayai.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah salah satu komponen paling penting dalam suatu sistem pencatatan akuntansi, karena dari laporan keuangan manajemen dapat diketahui apakah suatu perusahaan sehat atau tidak dalam praktiknya. Kieso, Weygant & Warfird (2007) mendefinisikan laporan keuangan merupakan sarana perkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah suatu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK-ETAP disahkan oleh 18 Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009 di Jakarta.

Penggunaan SAK-ETAP akan membantu perusahaan dengan skala kecil dan menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal. SAK-ETAP akan khusus digunakan untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek dan memiliki akuntabilitas publik signifikan tetap harus menggunakan PSAK yang umum.

Tujuan Penyusunan SAK-ETAP

Martini (2011) menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP lebih sederhana dibanding penerapan PSAK umum yang mengacu pada IFRS dikarenakan SAK- ETAP mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Dijelaskan oleh Basir (2010) bahwa penerapan SAK ETAP bebas diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), jika ETAP belum memiliki rencana pengembangan ke depan, bisnisnya dijalankan secara sederhana, tidak terlalu membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangannya, maka entitas ini tidak perlu menerapkan PSAK umum. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP (Syarif, 2010).

SAK ETAP memiliki 30 bab sejumlah 182 lembar yang terdiri dari ruang lingkup, konsep dan prinsip prevasif, penyajian laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan lain-lain. Didalamnya mencakup juga standar pelaporan akuntansi untuk masing-masing akun selayaknya SAK Umum.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan satuan angka. Dalam penelitian ini termasuk dalam data kualitatif berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada UMKM Batik di kota Semarang terkait dengan penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP). Metode Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi objek penelitian pada UMKM Batik Kota Semarang adalah berdasarkan kepemilikan usahanya. Setelah melakukan pengumpulan data selama proses penelitian, maka didapat hasil bahwa sebagian besar responden merupakan UMKM yang berada dibawah binaan Dinas Koprasi dan UMKM Kota Semarang yaitu sebesar 63% dari total responden seluruhnya atau sebanyak 19 UMKM. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kemudian 9 unit usaha atau sebesar 30% merupakan unit usaha yang bersifat independen yang hampir seluruh hal mengenai usahanya mulai dari pengaturan manajemen keuangan, produksi hingga pemasaran dilakukan secara pribadi dan hanya 2 dari 30 responden yang merupakan unit usaha dibawah binaan swasta yang juga bertujuan membantu meningkatkan kualitas pengusaha UMKM Batik Kota Semarang

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terdiri dari 30 Bab, namun pada penelitian ini peneliti hanya membahas 8 Bab pada 22 pertanyaan dalam kuesioner yang telah diberikan kepada responden yaitu meliputi Ruang Lingkup, Konsep dan Prinsip Pervasif, Penyajian Laporan Keuangan, Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Saldo Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 1. Rekapitulasi Kuesioner

| No. | Pertanyaan | JAWABAN | | TOTAL | % JAWABAN | |
|-----|--|---------|-------|-------|-----------|-------|
| | | YA | TIDAK | | YA | TIDAK |
| 1 | Apakah anda memahami isi SAK ETAP ? | 6 | 24 | 30 | 20% | 80% |
| 2 | Apakah anda melakukan pembukuan ? | 26 | 4 | 30 | 87% | 13% |
| 3 | Apakah terdapat software akuntansi khusus untuk mendukung pembukuan ? | 0 | 30 | 30 | 0% | 100% |
| 4 | Apakah anda rutin melakukan pembukuan pelaporan keuangan? | 24 | 6 | 30 | 80% | 20% |
| 5 | Entitas memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi ? | 8 | 22 | 30 | 27% | 73% |
| 6 | Entitas memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan ? | 9 | 21 | 30 | 30% | 70% |
| 7 | Entitas menyajikan laporan perubahan posisi keuangan? | 16 | 14 | 30 | 53% | 47% |
| 8 | Apakah Entitas menyajikan laporan laba rugi ? | 21 | 9 | 30 | 70% | 30% |
| 9 | Bagaimana Entitas menyajikan laporan arus kas ? | 3 | 27 | 30 | 10% | 90% |
| 10 | Bagaimana entitas menyajikan laporan aset lancar dan aset tidak lancar ? | 9 | 21 | 30 | 30% | 70% |
| 11 | Entitas menyajikan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan ? | 7 | 23 | 30 | 23% | 77% |
| 12 | Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan min 1 kali | 6 | 24 | 30 | 20% | 80% |
| 13 | Entitas menyajikan informasi komparatif (perbandingan)? | 17 | 13 | 30 | 57% | 43% |
| 14 | Apakah transaksi diukur berdasarkan biaya historis? | 16 | 14 | 30 | 53% | 47% |
| 15 | Apakah transaksi diukur berdasarkan nilai wajar? | 19 | 11 | 30 | 63% | 37% |

| | | | | | | |
|-------------|---|----|----|----|-----|-----|
| 16 | Apakah anda mengetahui bahwa terdapat standar akuntansi dikoperasi dalam menyusun laporan keuangan ? | 10 | 20 | 30 | 33% | 67% |
| 17 | Apakah anda pernah mendengar tentang SAK ETAP | 9 | 21 | 30 | 30% | 70% |
| 18 | Apakah anda memahami serta mengerti praktek SAK ETAP? | 3 | 27 | 30 | 10% | 90% |
| 19 | Menurut saya SAK ETAP adalah sebuah pedoman dalam menyusun laporan keuangan? | 14 | 16 | 30 | 47% | 53% |
| 20 | Apakah dengan menggunakan SAK ETAP, kemampuan koperasi dalam melakukan penilaian pada kinerja perusahaan akan meningkat ? | 12 | 18 | 30 | 40% | 60% |
| 21 | Apakah penerapan SAK ETAP akan memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja usahanya ? | 18 | 12 | 30 | 60% | 40% |
| 22 | Apakah koperasi seharusnya Menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan? | 19 | 11 | 30 | 63% | 37% |
| Rata - rata | | | | | 41% | 59% |

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 1 tentang rekapitulasi penelitian, dapat dilihat bahwa hanya 20% UMKM Batik di Kota Semarang yang sudah memahami isi SAK ETAP dan 80% tidak memahami SAK ETAP. Pencatatan keuangan yang disajikan selama ini hanyalah pemasukan dan pengeluaran. Namun apabila dilihat pencatatan keuangan atau pembukuan yang dihasilkan, 87% unit usaha batik di kota Semarang telah melakukan pembukuan yang sebagian besar dilakukan secara manual, sedangkan informasi akuntansi harus dihasilkan tepat waktu agar informasi tersebut relevan sebagaimana yang diisyaratkan oleh SAK ETAP.

Untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu, sudah seharusnya penerapan akuntansi tersebut dilakukan secara komputerisasi atau dibantu dengan software akuntansi. Beberapa UMKM hanya menggunakan perangkat lunak *microsoft excel* untuk melakukan pencatatan transaksinya. Dapat dilihat juga bahwa tidak ada satupun dari UMKM Batik Kota Semarang yang melakukan pembukuan dengan menggunakan *software* akuntansi khusus. Seluruh pemilik UMKM Batik Kota Semarang beranggapan bahwa membeli software akuntansi masih dirasa sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan manfaat langsung yang akan diperoleh sehingga pencatatan manual yang dilakukandirasa sudah memenuhi tujuan laporan keuangan yang di inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tersebut dalam menerapkan akuntansi guna menghasilkan informasi keuangan belum memenuhi karakteristik mutu informasi yaitu relevan dan tepat waktu sebagaimana yang diisyaratkan dalam SAK ETAP. Penggunaan software akuntansi hanyalah salah satu cara untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu sehingga relevan informasinya. Pencatatan dengan menggunakan perangkat lunak *microsoft excel* sebenarnya masih dapat menghasilkan laporan keuangan tetapi untuk skala yang agak besar mempunyai kelemahan dalam penyimpanan data transaksi yang sangat banyak, sehingga tidak menjamin keamanan data. Serta kecepatan dalam menghasilkan informasi penggunaan *software* akuntansi akan sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat dan relevan.

Pembukuan atau pencatatan laporan keuangan adalah salah satu cara mendokumentasikan aktivitas usaha perusahaan, dari laporan keuangan pemilik dapat mengetahui kinerja operasional usahanya, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, dan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. Dari hasil penelitian, 80% UMKM telah melakukan pembukuan secara rutin setiap periodenya dan 20% unit usaha hanya melakukan pembukuan ketika dibutuhkan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak valid yang mengakibatkan banyak informasi yang diungkapkan secara tidak wajar.

Laporan keuangan umumnya merupakan salah satu syarat pengajuan kredit pada perbankan, namun dengan kualitas laporan keuangan yang tergolong rendah akan menjadi kendala bagi pihak perbankan untuk dapat mengandalkan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Hal ini menyebabkan perbankan lebih mengandalkan *soft information*, seperti *assets based lending* (yaitu berdasarkan aset-aset yang dimiliki UMKM yang dapat dijadikan jaminan kredit) sehingga UMKM tetap dapat menerima tambahan modal dari pihak perbankan. Dengan adanya kemudahan bagi UMKM dalam menerima kredit, menyebabkan para pelaku usaha beranggapan laporan yang dibuat tidak terlalu penting.

Pada tabel 1 juga dapat dilihat bahwa hanya 27% UMKM Batik di Kota Semarang yang memberikan informasi tentang dasar-dasar atau aturan dalam penyusunan laporan keuangan pada unit usaha tersebut, dan 30% para pelaku usaha juga tidak memberikan informasi atau akun-akun tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa masih lebih dari 70% UMKM tersebut yang tidak menyajikan laporan keuangannya secara lengkap atau memenuhi seluruh karakteristik mutu informasi akuntansi sebagaimana yang telah di isyaratkan dalam SAK-ETAP.

Neraca merupakan bagian laporan keuangan yang menyajikan laporan keuangan satu periode akuntansi yang dapat menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Dari hasil wawancara mendalam dengan para pengusaha batik di Semarang 53% pengusaha UMKM Batik Kota Semarang menyajikan laporan perubahan posisi keuangan atau neraca sederhana yang hanya mencakup kas, persediaan bahan baku pembuatan batik, properti, dan aset tetap dan 47% tidak menyajikannya. Laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan belum sepenuhnya sesuai dengan neraca minimal dalam SAK-ETAP yang mencakup pos-pos berikut ini:

- a. Kas dan setara kas,
- b. Piutang usaha dan piutang lain-lain,
- c. Persediaan,
- d. Properti investasi,
- e. Aset tetap,
- f. Aset tidak berwujud,
- g. Utang usaha dan utang lainnya,
- h. Aset dan kewajiban pajak,
- i. Kewajiban di estimasi
- j. Ekuitas.

SAK ETAP juga mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi dalam paragraf 5.1 - 5.4. Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali jika SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup pendapatan, beban, serta bagian laba atau rugi investasi.

Hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan 70% UMKM Batik di Kota Semarang telah menyajikan laporan laba rugi dalam pelaporan keuangannya. Hal ini cukup baik mengingat laporan laba rugi sangat penting dibuat untuk memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan di periode mendatang,

selain itu dapat juga untuk mengetahui baik buruknya kinerja unit usaha tersebut. Laporan laba rugi yang berisi akun akun biaya dan pendapatan, kedua jenis akun tersebut diselisihkan. Ketika akun pendapatan lebih besar maka didapat laba, jika terjadi sebaliknya akun biaya yang tersisa maka usaha mengalami kerugian.

Laporan laba rugi diatas sama pentingnya dengan Laporan arus kas, namun pada tabel 1 dapat dilihat hanya 10% UMKM Batik di Semarang yang menyajikan laporan arus kas, yang berarti 90% pengusaha UMKM Batik belum memenuhi kelengkapan dalam pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP. Arus kas akan memberikan informasi perubahan secara historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasional dan pendanaan yang terjadi pada suatu unit usaha.

Dalam SAK ETAP menganjurkan laporan arus kas dibuat dengan metode tidak langsung. Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu unit usaha dalam satu periode. Informasi arus kas suatu usaha berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas. Entitas juga harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan arus kas.

Dari hasil penelitian pada tabel 1 dapat dilihat bahwa hanya 30% UMKM Batik di kota Semarang yang menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, yang berarti 70% UMKM tidak memenuhi standar yang disyaratkan SAK ETAP. Dalam SAK ETAP paragraf 4.5-4.7 bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan. Entitas harus mengakui semua aset lainnya sebagai aset tidak lancar apabila siklus operasi normal perusahaan atau dalam 12 bulan tidak dapat diidentifikasi secara jelas.

Penyajian klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode juga harus konsisten, kecuali jika terjadi perubahan yang cukup signifikan atas operasional para pelaku usaha atau perubahan penyajian dan pengklasifikasian laporan keuangan menjadi lebih baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh SAK-ETAP dan hanya 23% dari keseluruhan responden yang menyajikan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, yang berarti masih banyak para pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajaran dalam penyajian laporan keuangan berbasis SAK-ETAP.

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan alasan menggunakan periode pelaporan selain periode satu tahunan. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik unit usaha batik di Kota Semarang, hanya 20% unit usaha yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap yaitu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan hanya sesekali ketika dibutuhkan. Padahal setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap, bukan hanya didasarkan pada laba semata. Namun 80% pengusaha UMKM Batik Kota Semarang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap minimal satu kali dalam satu periode akuntansi. Artinya masih banyak pengusaha Batik di Kota Semarang yang belum memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu kelengkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa 57% pengusaha UMKM menyajikan informasi kompratif yang artinya sudah lebih dari setengah total responden memenuhi penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai SAK-ETAP bahwa informasi yang diungkapkan secara

komparatif atau dibandingkan laporan keuangan periode sekarang dengan sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh SAK- ETAP (Termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Untuk menentukan saldo dalam pencatatan transaksi, dasar pengukuran yang umum digunakan oleh UMKMadalah biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis adalah jumlah biaya sesuai dengan harga pada saat perolehan. Sebanyak 53% UMKM Batik Kota Semarang mengukur transaksi berdasarkan biaya historis dan menjadi *price maker* untuk produk yang diproduksi sendiri. Sedangkan 63% Pengusaha Batik Kota Semarang menggunakan nilai wajar dalam pengukuran transaksinya, atau lebih memilih mengikuti harga pasaran untuk kerajinan batik yang dijualnya.

Dewan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik berfungsi untuk menyelaraskan pemakaian laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Namun berdasarkan data yang didapat, tidak semua Usaha Mikro Kecil Menengah mengerti praktek penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Hasil pengolahan kuesioner didapathanya 33% dari total responden yang mengetahui bahwa terdapat standar akuntansi keuangan khusus dalam penyusunan laporan keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik seperti UMKM. Namun hanya 10% dari responden yang memahami serta mengerti praktek dari penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Terbukti dalam tabel 1 bahwa hanya 30% responden yang mengaku pernah mendengar tentang sistem pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP, sedangkan 70% sisanya tidak. Kemungkinan diakibatkan oleh tingkat sosialisasi dan informasi yang diterima para pelaku UMKM yang relatif masih rendah dan terbatas.

Kurang dari setengah dari total responden yang setuju dengan anggapan bahwa SAK-ETAP merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu 47% pelaku UMKM Batik Semarang, sisanya beranggapan bahwa pedoman dalam pembuatan laporan keuangan tidak harus SAK-ETAP, masing-masing unit usaha merasa memiliki cara khusus yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangannya. Dan dari tabel 1 juga dapat dilihat bahwa hanya 40% UMKM yang percaya bahwa dengan menerapkan SAK-ETAP kemampuan koperasi dalam melakukan penilaian kinerja usaha akan meningkat, sisanya lebih setuju dengan anggapan bahwa meningkatnya kinerja suatu usaha dilihat dari laba yang dihasilkan atau pada keadaan nyatanya dan bukan hanya berdasarkan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan.

Koperasi dalam hal ini merupakan induk atau lembaga yang membina beberapa UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini baik Pemerintah Kota Semarang maupun pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan 60% UMKM setuju bahwa dengan menerapkan SAK ETAP akan memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan yang dihasilkan dalam menilai kinerja usahanya. 63% UMKM juga sependapat bahwa sudah seharusnya koperasi menerapkan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan. Melihat sudah banyak pelaku usaha yang beranggapan positif pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan maka diharapkan lebih banyak sosialisasi mengenai SAK-ETAP dari pihak pemerintah bukan hanya pada unit usaha binaan, namun juga merangkul UMKM yang bersifat independen, sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya bidang kerajinan seni batik semakin maju.

Secara keseluruhan dapat kita lihat dari tabel 1 bahwa rata-rata hanya 41% UMKM Batik di Kota Semarang yang telah menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penyusunan laporan keuangansesuai dengan siklus akuntansi serta sesuai dengan SAK-ETAP. Dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti didapat bahwa beberapa UMKM yang berada dibawah binaan lembaga tertentu terutama Pemerintah Kota Semarang pernah mendapat pelatihan terkait SAK ETAP. Namun menurut mereka pelatihan yang diberikan adalah pelatihan dasar melakukan pembukuan akuntansi

seperti bagaimana mengarsip bukti-bukti transaksi serta teknik dasar pencatatan keuangan seperti proses dalam siklus akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan dan hanya bersifat seperti seminar sehari sehingga hanya memberikan teori semata namun tidak ada aspek prakteknya. Para pengusaha berharap pelatihan yang diberikan adalah dengan cara berkelanjutan dan pelatihan praktik kepada para pengusaha sehingga pelaku UMKM lebih mudah merealisasikannya pada usaha mereka.

SIMPULAN.

Setelah melakukan penelitian pada UMKM Batik di Kota Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penetapan akuntansi pada UMKM Batik Kota Semarang masih sangat sederhana dan rata-rata belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik, karena banyak UMKM yang belum sepenuhnya memenuhi tahapan - tahapan dalam siklus akuntansi.
2. Kendala - kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam menyusun laporan keuangan yaitu karena kurangnya pengetahuan secara teknis dalam menyusun laporan keuangan, khususnya berbasis SAK-ETAP serta kurangnya kesadaran dan disiplin dari pihak UMKM akan pentingnya laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar. UMKM merasa bahwa laporan keuangan yang menunjukkan laba rugi perusahaan saja sudah cukup.
3. Persepsi dan pemahaman para pengusaha UMKM Batik di Kota Semarang mengenai Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ternyata masih kurang. Hal ini disebabkan karena para UMKM merasa kurang mendapatkan sosialisasi oleh dinas terkait setempat seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepada para pengusaha UMKM Batik Kota Semarang perlu untuk lebih berperan aktif dan bekerja sama dengan pemerintah maupun dinas terkait untuk terus melakukan perbaikan dalam bidang pencatatan keuangan. Karena laporan keuangan dapat memberikan kemudahan pada unit usaha untuk melihat keadaan operasional usahanya.
2. Untuk meningkatkan kualitas UMKM Batik di Kota Semarang, Pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang berperan selaku pembuat kebijakan serta lembaga pendamping untuk lebih aktif dalam sosialisasi dan melakukan pelatihan kepada pelaku usaha untuk memahami dan mengimplementasikan SAK ETAP.
3. Akademis harus berperan secara pasif maupun aktif dalam pengembangan UMKM Batik di Kota Semarang. Perguruan tinggi harus menjalankan fungsinya dalam bidang pengabdian masyarakat melalui riset-riset untuk pengembangan dalam hal ini sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya. Seperti alat produksi yang lebih efektif, mudah dan dengan kualitas yang baik dapat menjadi cara akademisi dalam pengembangan UMKM Batik di Kota Semarang
4. Diharapkan untuk kedepannya terdapat sinergi antara Pemerintah, Akademis atau mahasiswa maupun UMKM itu sendiri untuk meningkatkan kinerja dan kualitas UMKM Batik di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, Arri, dkk. 2014, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten*. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.2.
- Andriani, Lilya, dkk. 2014, *Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepetatif pada Peggy Salon)*. Jurnal Akuntansi Vol.2, No.1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Per 1 Oktober*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kalangi, Lintje, dkk. 2013. *Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan*. Jurnal EMBA. Vol.2, No.3.
- Kieso, Donald., Jerry Weygant., Terry Warfield. 2011. *Intermediate Accounting,IFRS Edition*. John Wiley & Sons. Inc.,USA.
- Notohatmodjo, Tegar Satriyo, 2014, *Evaluasi Terhadap Sitem Pencatatan Akuntansi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi. Vol.3, No.2. ISSN: 2337-3806.
- Salmiah, Neneng, 2015, “*Analisa Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru)*”. Jurnal Akuntansi. Vol.3, No.2. ISSN: 2337-4314.\
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).